

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT*
GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA:
STUDI KASUS KANTOR PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

LUGINAH

NIM. 4319060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT*
GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA:
STUDI KASUS KANTOR PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

LUGINAH

NIM. 4319060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luginah

NIM : 4319060

Judul Skripsi : **Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Kantor Pemerintah Desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Mei 2023

Yang menyatakan



Luginah
NIM. 4319060

NOTA PEMBIMBING

Pratomo Cahyo Kurniawan, M.AK

Desa Sugihwaras - Pemalang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdri. Luginah

Yth.

Dekan Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini saya

kirirkan naskah skripsi saudara:

Nama : Luginah

NIM : 4319060

Judul Skripsi : **Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Kantor Pemerintah Desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 22 Mei 2023

Pembimbing



Pratomo Cahyo Kurniawan, M.AK.

NIP.19890708 202012 1 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, tebi.uinsuinduripac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Luginah**
NIM : **4319060**
Judul : **Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Kantor Pemerintah Desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan**
Dosen Pembimbing : **Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak.**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

M. Nasrullah M.S.I.

NIP. 1980128 200604 1 003

Penguji II

Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si.

NIP. 19841031 201908 1 001

Pekalongan, 10 Juli 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

“kemauan lebih penting daripada kemampuan ”

“ Mulailah dari tempatmu berada, gunakan yang kamu punya, lakukan yang kamu bisa ”

“sekarang kehidupan saya akan jadi bagus; kaya atau miskin dan kering; itu hanya tergantung saya”

“ikhtiar, doa, tawakal, dan restu orang tua”

(021301)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi bekal untuk masa depan dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta. Bapak Rustono dan Ibu Taliyah yang selalu mendoakan serta mendukung dalam penyelesaian Skripsi.
2. Diri saya sendiri yang mau dan selalu berusaha untuk bertanggungjawab menyelesaikan pilihan yang sudah dipilih.
3. Keluarga saya dan Kerabat Rumah yang selalu memberi support semangat dan do'a.
4. Sahabat seperjuangan Akuntansi Syariah selama perkuliahan hingga pembuatan skripsi yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing, Bapak Novendi Arkham Mubtadi M. Akun dan Bapak Pratomo Cahyo Kurniawan M. AK yang selalu membantu serta mengarahkan penelitian hingga penulisan Skripsi ini terselesaikan.
6. Dosen Wali, Bapak Ade Gunawan, M.M yang telah menjadi orang tua kedua selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman Program Studi Akuntansi Syariah 2019 yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan.
8. Almamater UIN K.H. Abduurahman Wahid Pekalongan

ABSTRAK

LUGINAH. Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Kantor Pemerintah Desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Perkembangan era reformasi di zaman sekarang, otonomi daerah telah berkembang sebagai hal yang memberi efek pergantian atas pengelolaan dan pelaporan keuangan wilayah secara signifikan. Pemerintah daerah diberi kepercayaan mengatur dana umum dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga pengelolaan keuangan daerah diharapkan berjalan tertib, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan bisa bertanggung jawab.

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan alat analisis IBM SPSS 26. Jenis data yang digunakan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner serta menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel yang didapat 132 orang yang terdiri dari aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Bojong. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good government governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, sedangkan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: *Good Government Governance*, Pengendalian Internal dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

LUGINAH. The effect of the implementation of good government governance and internal control on the performance of village financial management: case studies in village government offices in bojong district, pekalongan regency.

The development of the current reform era, regional autonomy has developed as a matter that has an impact on changing the of management and reporting of regional finance significantly. Local government are entrusted with managing general funds in the hope of improving people's welfare. So that it is hoped that regional financial management can run in an orderly manner, in accordance with the law and can be accounted for.

This type of research is included in field research using a quantitative approach. The type of data used is primary data with data collection techniques using the questionnaire method and using a purposive sampling technique in order to obtain a sample of 132 people consisting of village government officials in bojong district. This study uses data analysis multiple linear regression.

The results of this study indicate that good government governance has a significant effect on village financial management performance, while internal control has no effect on performance. Village financial management.

Keywords: Good Government Governance, Internal Control and Village Financial Management Performance

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat- Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai Dosen Penasihat Akademik (DPA)
6. Bapak Novendi Arkham Mubtadi M. Akun dan Bapak Pratomo Cahyo Kurniawan, M. AK selaku Dosen pembimbing skripsi penulis.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan do'a dan semangat kepada

penulis

8. Bapak-Ibu Perangkat Desa di Kecamatan Bojong atas ketersediaannya menjadi responden dalam pengambilan data penelitian ini.
9. Sahabat saya dan semua teman yang telah meberikan do'a, dukungan dan semangat selama menjalani perkuliahan dan penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2019.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 22 Mei 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
B. Telaah Pustaka	25
C. Kerangka Berfikir	35
D. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Setting Penelitian	37
C. Teknik Penarikan Sampel	37
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	39
E. Sumber Data	42

F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Metode Analisis Data	43
1. Uji Kualitas Data	43
2. Uji Asumsi Klasik.....	44
3. Uji Hipotesis	46
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum	48
B. Deskripsi Data	48
C. Statistik Deskriptif.....	52
D. Analisis Data	60
E. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Keterbatasan Peneliti	71
C. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	I

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﷲ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُ = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة ditulis *fāṭimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddad tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof (/'). Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai`un</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 APBDes Tahun 2022	2
Tabel 2.1 Telaah Pustaka,	25
Tabel 3.1 Desa di Kecamatan Bojong	38
Tabel 3.2 Definisi Oprasional Variabel,	41
Tabel 3.3 Skala Likert,	43
Tabel 4.1 Data Penyebaran Kuesioner	48
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin,	49
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan,	50
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan,	51
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Jabatan,	52
Tabel 4.6 Jawaban Indikator Variabel X1	53
Tabel 4.7 Jawaban Indikator Variabel X2.....	55
Tabel 4.8 Jawaban Indikator Variabel Y.....	58
Tabel 4.9 Output Uji Validitas,	60
Tabel 4.10 Output Uji Reliabilitas,	62
Tabel 4.11 Output Uji Normalitas,	63
Tabel 4.12 Output Uji Multikolinearitas,	64
Tabel 4.13 Output Uji Heteroskedastisitas,	64
Tabel 4.14 Output Uji t Statistik,	65
Tabel 4.15 Output Uji Koefisien Determinasi (R^2) ,	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir,.....	35
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian ,.....	I
Lampiran 2. Tabulasi Data,	VI
Lampiran 3. Biodata Responden,	XVII
Lampiran 4. Ouput <i>IBM SPSS 26</i> ,	XXI
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Kampus,	XXVII
Lampiran 6. Bukti Tanda Izin Pengambilan Data Penelitian,.....	XXVIII
Lampiran 7. Dokumentasi,	XXXII
Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup,	XXXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia pada era reformasi mewajibkan pemerintah daerah merubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjadi pemerintah daerah yang lebih mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berdaulat mengatur pemerintahan berdasarkan gagasan masyarakat, wewenang asal-usul/ wewenang tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini membentuk desa mempunyai kewajiban yang strategis dalam pelayanan publik sekaligus pengaplikasian otonomi desa yang perlu diberikan kedaulatan disertai sarana dan prasarana yang sesuai (Ramendra, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Setiap desa menerima dana desa sesuai dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat depresi geografis. Setiap pengelolaan keuangan desa mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang wajib disertakan dalam APBDes (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes merupakan salah satu instrument penting yang menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

Pembangunan desa berusaha mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendorong kemandirian desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan nasional. Dengan hal ini pemerintah pusat memberikan dana desa yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, sehingga diharapkan pembangunan pemerintah desa harus dikelola dengan baik. Kecamatan Bojong merupakan salah satu kecamatan di kabupaten pekalongan yang menerima dana desa. Kecamatan Bojong terdiri dari 22 desa, setiap desa menerima dana desa dengan jumlah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Besarnya APBDes yang diterima setiap desa di Kecamatan Bojong pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
APBDesa Tahun 2022

No.	Nama Desa	Jumlah
1.	Babalan kidul	Rp 1.448.914.647
2.	Babalanlor	Rp 2.122.167.654
3.	Bojong minggir	Rp 2.001.405.294
4.	Bojong wetan	Rp 2.124.470.349
5.	Bojonglor	Rp 1.319.994.872
6.	Bukur	Rp 1.530.230.257
7.	Duwet	Rp 1.652.332.247
8.	Jajarwayang	Rp 2.100.167.756
9.	Kalipancur	Rp 2.329.284.599
10.	Karangsari	Rp 1.345.665.650
11.	Kemasan	Rp 1.295.172.397
12.	Ketitang Kidul	Rp 1.730.872.819
13.	Ketitanglor	Rp 1.134.801.935
14.	Legokclile	Rp 1.375.283.855
15.	Menjangan	Rp 1.381.490.792

16.	Pantianom	Rp 1.453.571.511
17.	Randumuktiwaren	Rp 1.517.930.257
18.	Rejosari	Rp 1.288.235.536
19.	Sembungjambu	Rp 1.940.598.627
20.	Sumur Jomblangbogo	Rp 2.808.319.208
21.	Wangandowo	Rp 1.703.117.286
22.	Wiroditan	Rp 1.415.477.088

Sumber: APBDes se-Kecamatan Bojong

Perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang memiliki tujuan merespon tuntutan masyarakat terhadap tiga permasalahan utama, yaitu membagi dan berbagi kekuasaan, distribusi pendapatan, serta kemandirian sistem manajemen daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, desa dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, efisien, efektif, terbuka dan bertanggungjawab yang didukung melalui dana alokasi desa.

Kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi yang bertujuan untuk melayani masyarakat melalui kegiatan dan programnya, sehingga pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern dapat dilihat melalui sistem yang diterapkan dalam bekerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai tingkat pencapaian dalam memberikan pelayanan publik terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Pengelolaan keuangan desa salah satunya dapat diukur dengan pengukuran kinerja pemerintah desa menggunakan konsep *value for money*. Konsep ini merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sector publik yang didasari tiga komponen yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2009: 4). Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dalam mewujudkan peningkatan kinerja manajerial diperlukannya pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan

pemerintah, sehingga laporan keuangan serta pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan wajib dimiliki oleh pemerintah desa (Hendrawati, 2021).

Konflik pada sektor publik sangat bervariasi terutama dalam pelayanan publik, rakyat selalu menginginkan pelayanan yang baik yang bisa membawa hal kemakmuran bagi mereka, tetapi biasanya keadaan yang kerap dianggap sebagai persoalan setiap lembaga nonprofit (pemerintah daerah). Aparatur pemerintah wilayah kerap mengkhianati harapan publik dengan kinerja lembaga yang kurang baik yang sering dijadikan alasan oknum aparatur wilayah pemerintahan. Ambisi ini bermacam-macam seperti kepentingan publik, bekerja diluar kebijakan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta terdapat penghamburan dana oleh beberapa orang. Pada tahun 2022 terjadi kasus di salah satu pemerintahan desa kecamatan Bojong yaitu terjadi penyelewengan dana yang tidak transparan dalam pembangunan desa serta penyusunan RKPJMDes yang tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Dengan hal tersebut rakyat mengalami krisis kepercayaan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah wilayah sehingga dianggap berpengaruh pada tingkat efektivitas dan efisiensi pegawai pemerintah dalam menjalankan fungsinya.

Dampak globalisasi mendorong pengaplikasian *good governance* menjadi ideologi baru negara dalam memotivasi wilayahnya untuk menghormati prinsip ekonomi pasar maupun demokrasi dalam interaksi internasional. Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa diperlukan upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Secara praktis usaha Penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu dengan mewujudkan bentuk pemerintahan yang

bersih, berwibawa dan memberikan fasilitas kemudahan layanan atas jaminan hukum dan sosial bagi masyarakat serta pengelolaan keuangan desa didasarkan pada asas transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Penelitian yang dilakukan (Utomo & Efendi, 2019) menyatakan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Sedangkan penelitian dilakukan (Sunarmo et al., 2018) menyatakan bahwa *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan banyak terjadi permasalahan seperti kurang maksimalnya kinerja, penilaian kinerja di akhir periode yang tidak memuaskan, dan setiap tahun instansi pemerintahan di evaluasi dan dinilai kinerjanya sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Terkadang ditemukan pejabat daerah yang bermasalah sehingga banyak pejabat publik dalam pelaksanaan kegiatannya khawatir dan akhirnya mencari aman dengan tidak melakukan kegiatannya secara maksimal.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu kegiatan tindakan yang dilakukan pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal wajib dilakukan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah negara, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan sistem tersebut bentuk kendali terhadap

mekanisme pengelolaan keuangan desa dapat tetap selaras sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan kinerja aparatur pemerintah bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sekaligus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pernyataan diatas dapat didukung dengan penelitian yang didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman & Rachman, 2021) hasil penelitian menyatakan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan (Budiati et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Setiap pemerintah desa diharapkan membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan tanggungjawab aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Penelitian Budiati menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, keterlibatan, dan kapasitas aparatur. Akan tetapi efek akuntabilitas, keterbukaan dan partisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak terpengaruh oleh sistem pengendalian internal (2002, 2002). Adanya penerapan *good government governance* dan pengendalian internal diharapkan dapat meningkatkan tingkat kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik khususnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menganalisa pengaruh penerapan *good government governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pernah dilakukan beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Putro & Priyastiwati, 2018) dengan judul penelitian pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah, dihasilkan kesimpulan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian (Febrina, 2017) menyatakan *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan pemerintah desa.

Hasil uji dari beberapa penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk menguji kembali variabel dari penelitian terdahulu dengan obyek yang berbeda. Peneliti mengambil objek Kantor pemerintah desa di Kecamatan Bojong sebagai objek penelitian dengan melihat fenomena yang peneliti temukan yaitu mengenai pengelolaan dana desa yang dilaporkan oleh masyarakat bahwasanya pengelolaan tidak transparan dan banyak yang digunakan bukan untuk prioritas pembangunan, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Sehingga penelitian ini diberi judul “Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Kantor Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada kantor pemerintahan desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada kantor pemerintahan desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *good government governance* terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada kantor pemerintah desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada kantor pemerintahan desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengembangan keilmuan khususnya di bidang akuntansi, terutama dalam membuktikan teori-teori yang

melandasi penelitian yaitu penilaian kinerja sektor publik khususnya pemerintah desa dengan menciptakan tata kelolaan pemerintahan yang baik (*good government governance*) dan pengendalian internal yang tercipta dengan baik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa di kecamatan bojong untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan publik masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibuat untuk mempermudah pembaca dengan membaca keseluruhan dari hasil penelitian. Sistematika penulisan yang digunakan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai landasan teori sebagai pemecahan masalah, telaah pustaka sebagai pendukung, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai data penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari peneliti dan saran, diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran lain yang mendukung penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis data dalam penelitian tentang penerapan *good government governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja kinerja pengelolaan keuangan desa: studi kasus balai desa di kecamatan Bojong, yaitu:

1. Penerapan *good government governance* pada uji t berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pemerintahan desa di kecamatan bojong. Hasil SPSS membuktikan variabel *good government governance* memiliki nilai t_{hitung} variabel yaitu $4.564 > t_{tabel} 1.97852$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.
2. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan kantor pemerintah desa di kecamatan bojong. Hal ini dibuktikan dengan hasil SPSS nilai t_{hitung} variabel sistem pengendalian internal pemerintah yaitu $t_{hitung} -0,756 < t_{tabel} 1,97852$ atau nilai signifikansi $0,451 > 0,05$.

B. Keterbatasan Peneliti

Penelitian yang telah dilaksanakan dan diselesaikan tentunya masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, ada beberapa keterbatasan dalam penelitian yang sudah pada studi, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan 22 sampel desa di kecamatan bojong sehingga memerlukan waktu cukup lama karena jarak antar desa yang jauh.

2. Penggunaan variabel dependen pengendalian internal dengan variabel independent kinerja pengelolaan keuangan desa, untuk itu perlu adanya penelitian lebih banyak mengenai penelitian ini agar semakin akurat.
3. Keterbatasan memakai instrument kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden, terkadang responden tidak memberikan jawaban dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan setiap responden memiliki pemahaman yang berbeda pada pernyataan kuesioner.
4. Fokus penelitian hanya pada satu populasi saja, yaitu pada kecamatan. Sehingga hasil dan kesimpulan tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintahan desa yang ada di Indonesia.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan pengambilan keputusan terdapat beberapa penelitian tambahan yang dapat dilakukan berdasarkan temuan serta keterbatasan penelitian, khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, diantaranya:

1. peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian dan menambah variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. hal ini diperlukan untuk terus meningkatkan akurasi hasil penelitian agar lebih sempurna dari penelitian ini.
2. Kinerja pengelolaan keuangan desa diperkirakan masih dipengaruhi variabel independen lainnya seperti komitmen organisasi diharapkan dapat ditambahkan pada penelitian selanjutnya.

3. Untuk memaksimalkan hasil penelitian, metode survei diharapkan dapat dilengkapi dengan teknik wawancara langsung dengan responden sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat.
4. Kinerja pengelolaan keuangan desa diharapkan lebih ditingkatkan lagi dengan memperkerjakan aparatur desa yang memiliki kapasitas yang diperlukan, keandalan pelaporan keuangan, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, menumbuhkan komitmen masing-masing individu serta meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan agar kinerja pengelolaan keuangan semakin efisien, ekonomis dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Amelia, I. (2020). *pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan*. 12, 32–42.
- Ariani, A. (n.d.). *Gayatri 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia*. 2481–2489. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i10.p06>
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. 9(2), 61–70.
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>
- Dana, P., Di, D., Sewurejo, D., Wardani, M. K., Fauzi, A. S., Ekonomi, F., & Surakarta, I. (n.d.). 1), 2) 1. 11(43), 108–127.
- Faisal, A., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis kinerja keuangan. *Kinerja*, 14(1), 6. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i1.2444>
- 2022, N. R. S. (2019). (*STUDI EMPIRIS PADA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN*. 1(1), 118–130.
- Febrina. (n.d.). *5446-10770-4-PB*.
- Handayani. (2020). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Heluka, R., Pattiasina, V., & ... (2022). Dampak Penerapan Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of ...*, 1, 39–52. <https://stia-saidperintah.e-journal.id/jba/article/view/80%0Ahttps://stia-saidperintah.e-journal.id/jba/article/download/80/62>

- Hendrawati, L. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. *Molucca Medica*, 11(April), 100–117.
- Heriningsih dan Sudaryati, 2019. (2019). *Good governance*. 6.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Mahsun. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, GCG, dan Keberadaan Awig-Awig Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa dengan Tri Hita Karana sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada LPD di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(6), 413–424. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/29263>
- Martini, R. (2019a). *Keywords : government intern control system , accountability , village fund Sumber : Kementerian Keuangan RI . 2017 (diolah); (Hartati , Martini , Zulkifli , & Widyastuti , 2018) Peningkatan dana tiap tahunnya membutuhkan pengelolaan keuangan desa yan*. 2(1), 106–123.
- 2002, H. (2002). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>
- Martini, R. (2019b). *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 1–29.
- Maulina. (2019). *Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Kabupaten Kampar (Maulina Agustiniingsih)*. 235–247.
- Munawarah, M. 2022. (2022). *SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH* Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Pangestika, F. 2020. (n.d.). *PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL , GOOD GOVERNANCE , DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL , GOOD GOVERNANCE , AND ORGANIZATION* (Issue 3).
- Panjaitan, S. A. (2015). *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi Dilihat dari Persepsi Pegawai*. 1–120.

- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. In *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. CV. Wade Group.
- Putro, A. W. A., & Priyastiwati, P. (2018). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Good Governance terhadap Kinerja di Pemerintah Kota Yogyakarta*. [http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/173%0Ahttp://eprint.stieww.ac.id/173/1/141215009 Andreas Wahyu Anggoro Putro UNGGAH.pdf](http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/173%0Ahttp://eprint.stieww.ac.id/173/1/141215009%0AAndreas%20Wahyu%20Anggoro%20Putro%20UNGGAH.pdf)
- Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021a). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar. *Equilibrium*, 2(February), 25–31.
- Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021b). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar. *Equilibrium*, 2(February), 25–31. <https://doi.org/10.37541/eq.v2i1.510>
- Ramendra. (2020). pengaruh penerapan good governance dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>
- Rudi Susanto, 2019. (n.d.). *No Title*.
- Setio, K. (2018). *No Title*. 13(April), 50–66.
- Sischa Tri Wahyu Widiyanti. (2018). *Kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa jabon kecamatan jombang kabupaten jombang*. 1–7.
- Soo, A. (2018). Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value for Money Pada Program Anak Usia Dini Dan Program Peningkatan Peran *Universitas Sanata Dharma*. Yogyakarta.
- Sukma, N. R. (2021). *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara*. [http://repository.uinsu.ac.id/11578/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/11578/1/SKRIPSI NOVITA RIYATI SUKMA.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/11578/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/11578/1/SKRIPSI%20NOVITA%20RIYATI%20SUKMA.pdf)

- Sunarmo, A. S., Widianingsih, R. W., Pratiwi, U. P., & Hidayat, T. H. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 9–18. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i1.2126>
- Triana, R. (2017). Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur'an. *At-Tadabbur*, 2(2), 292–318.
- Utomo, T. R. A., & Efendi, D. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi Publik Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya). *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–21.